

Sarkasme figur politik di media sosial Sarcasm of political figures on social media

Radita Gora^{1)*}, Lasmery Girsang²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta

²⁾Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia, Jakarta

¹⁾ Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat

²⁾Jalan Lodan Raya No. 2, Ancol, Jakarta Utara

Naskah diserahkan 26 Januari 2022 / Disetujui 24 Agustus 2022

ABSTRACT

Megawati has been already known as the daughter of the former Indonesian President (Soekarno) and has served as the fifth President of the Republic of Indonesia. Although her figure has also been known as president and political party owner of PDIP, she cannot be separated from bullying and hate speech through social media yet, especially when she was appointed to the BRIN Steering Committee, emerging a negative communication culture in digital media. So through this problem, the researchers aim to seek a negative communication culture that appears on social media. Through the theory of Computer Media Communication (CMC), the researchers attempt to find the use of language and communication from netizens and use a virtual ethnographic approach to analyze the use of language and speech on social media. The results of the study show that various kinds of speculation and sarcasm are expressed in language and sentences that are not straightforward or are often disguised in a satirical style, the use of languages commonly used in computer language rhythms. These can be seen in the use of netspeak and netlinggo such as the use of contemporary language to the use of satire joke language which is usually expressed through virtual text on social media, then using acronym words in conveying messages. Also, from the classification of audiences giving comments were tourists and devotees, but mostly for giving criticism that was oppositional and such as siding with the struggle for interests and research institutions. So, the audience seemed not to have much knowledge about research institutions and only paid attention to the controversial figure of Megawati. In conclusion, it was found that the forms of sarcasm expressed were more speculation or assumptions, as well as justifications that the election of the BRIN Supervisory Board was filled with political interests and also an effort to maintain power in the government.

Keywords: *Sarcasm, Politics, Virtual Ethnography, Bullying, Megawati*

ABSTRAK

Sosok figur Megawati sudah dikenal sebagai putri dari mantan Presiden Soekarno dan juga pernah menjabat sebagai Presiden RI kelima. Meski sosoknya dikenal pernah berkontribusi sebagai kepala negara dan juga Ketua Umum PDIP, namun tidak lepas begitu saja dari perundungan dan ujaran kebencian melalui media sosial terutama ketika baru diangkat sebagai Dewan Pengarah BRIN yang memunculkan budaya komunikasi negatif di media digital. Sehingga melalui permasalahan ini, penulis bertujuan menemukan budaya komunikasi negatif yang muncul di media sosial.

*Korespondensi Penulis:

E-mail: lgirsang@bundamulia.ac.id

Melalui *Computer Media Communication Theory*, penulis berupaya untuk menemukan penggunaan bahasa dan komunikasi dari netizen, serta menggunakan pendekatan etnografi virtual untuk menganalisis penggunaan bahasa dan tuturan di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya berbagai macam spekulasi, sarkasme diutarakan dengan bahasa dan kalimat yang non lugas atau kerap tersamar dengan gaya sindiran, gaya satire hingga penggunaan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam ritme bahasa komputer. Hal ini terlihat pada penggunaan *netspeak* dan *netlinggo* seperti penggunaan bahasa 'kekinian' hingga penggunaan bahasa lelucon satire yang biasa diutarakan dengan teks virtual di media sosial, kemudian menggunakan kata-kata akronim dalam mengutarakan pesan. Serta, klasifikasi audiens yang paling banyak berkomentar adalah klasifikasi *tourists* dan juga *devotee*, namun lebih banyak untuk memberikan kritik bersifat oposisional dan seperti berpihak memperjuangkan kepentingan maupun lembaga riset sehingga audiens terlihat tidak banyak memiliki pengetahuan tentang lembaga riset dan hanya memperhatikan sosok Megawati yang kontroversial. Sebagai kesimpulan ditemukan bahwa bentuk sarkasme yang diutarakan lebih banyak spekulasi atau anggapan, maupun justifikasi bahwa pemilihan Dewan Pengawas BRIN sarat dengan kepentingan politik dan juga upaya mempertahankan kekuasaan di pemerintahan.

Kata Kunci: Sarkasme, Politik, Etnografi Virtual, Perundungan, Megawati

PENDAHULUAN

Keberadaan Megawati Soekarno Putri di kancah politik di Indonesia memang sudah tidak diragukan sosoknya sebagai mantan presiden RI, Pengarah partai PDI Perjuangan, dan juga putri dari Presiden pertama RI, (Alm) Ir. Soekarno. Kini Megawati dipercaya oleh pemerintah untuk menduduki jabatan di lembaga riset RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Dewan Pembina BRIN yang diangkat pada Oktober 2021 lalu.

Pengangkatan Megawati sebagai Dewan Pembina BRIN sejak awal sudah mengundang kontroversi yang begitu luas dan bukan tanpa kritik disertai celaan dari berbagai pihak, antara dinilai tidak layak dan tidak relevan mengangkat Megawati sebagai Dewan Pembina BRIN yang begitu kental dengan kepentingan praktis riset untuk kalangan intelektual dan untuk kepentingan akademik sebagai pemangku kepentingan utama sehingga perlu lebih selektif dalam memilih calon dewan pembina Badan Riset.

Selain itu, penunjukkan Megawati sebagai Dewan Pembina BRIN dinilai sarat dengan kepentingan politik dan Lembaga Riset hendaknya lebih bersifat netral dan tidak mudah disusupi kepentingan politik praktis. Selain itu banyak pihak yang menilai bahwa Megawati tidak layak menjabat sebagai Dewan BRIN karena dinilai tidak memiliki pengalaman riset yang memadai, tidak memiliki pengalaman sebagai akademisi di perguruan tinggi atau periset di lembaga riset. Sementara itu, rekam jeaknya sebagai peneliti pun juga dinilai tidak ada. Sehingga hal inilah yang membuat Megawati kemudian banyak yang menilai tidak layak untuk menjabat sebagai Dewan Pembina BRIN karena di dalam lembaga riset nasional harus berisi orang-orang intelektual yang mampu memajukan riset di Indonesia yang bukan didasarkan pada kepentingan politik biasa.

Keberadaan BRIN sebagai lembaga sentral riset dan teknologi terutama dalam mengakomodir penelitian-penelitian yang ada di berbagai lembaga pemerintah hingga lembaga pendidikan formal seperti pendidikan tinggi. Sebagai pusat lembaga riset nasional tentunya perlu ditunjang dengan pengelolaan dibawah periset atau akademisi yang sudah mencapai tahap tertinggi untuk bisa mencapai tujuan riset nasional menghasilkan kualitas penelitian yang bermutu sesuai dengan kaidah keilmuan. Namun harapan tersebut sepertinya tidak sejalan dengan misi para akademisi atau para ahli riset yang menghendaki seorang dewan pembina riset atau penelitian agar dipegang oleh personal yang sudah berpengalaman dan asam garam di bidang riset. Keberadaan Megawati dianggap sudah membuat pupus harapan dari para ahli riset maupun akademisi.

Keraguan terhadap Megawati ini pun sontak ramai di media massa. Seperti halnya dalam pemberitaan Tempo.co Rabu, 13 Oktober 2021. Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. Dewan Pengarah harusnya jadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila. "Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan

prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," kata Herlambang pada 1 Mei 2021 lalu.

Latar belakang Ketum PDIP ini dinilai oleh banyak tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini, Mega hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi Pengarah umum partai dan pernah presiden. Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Pengarah Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Pengarah Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tanggal 13 November 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, dijelaskan bahwa jabatan Pengarah Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Dewan Pengarah BPIP secara *ex-officio*.

Kontroversi ini pun dinilai bahwa tidak memiliki kompetensi di bidang riset bahkan tulisannya yang tercatat dalam jurnal penelitian berjudul Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004 itu dalam Jurnal Pertahanan dan Bela Negara volume 11, Nomor 1 tahun 2021, dinilai terlalu narsis karena menulis tentang dirinya sendiri dan juga tidak sesuai dengan kaidah penulisan dimana peneliti tidak mengutamakan objektivitas penelitian. Sehingga hal ini menurut penilaian banyak para ahli tidak sesuai dengan kompetensi sebagai Dewan Pengarah BRIN.

Pelantikan Megawati sebagai Pengarah dewan pengarah BRIN pun juga membuat lembaga BRIN termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengucapkan selamat kepada Megawati karena terpilih sebagai Pengarah Dewan Pengarah BRIN yang bentuk ucapan selamatnya tersebut dibuat dalam bentuk pamflet digital yang diunggah melalui media sosial resmi milik BRIN di twitter dan youtube @brin_indonesia sejak November 2021 lalu. Sontak hal ini membuat *netizen* atau warganet tidak suka dan banyak pengguna media sosial yang kemudian melontarkan kata-kata buruk atau ungkapan negatif kepada Megawati dengan berbagai macam tuduhan sebagai rasa tidak suka atau anti simpatik.

Lontaran pesimisme, sindiran hingga satir terus berdatangan dan bermunculan di twitter hingga komentar pedas masyarakat yang menjadi warganet ini pun menjadi santapan manis oleh para aktor politik yang berada di oposisi turut mendukung rasa keberatan para warganet untuk mengecam Megawati menjadi dewan pembina BRIN. Memang sungguh ironi ketika Pengarah Dewan lembaga riset yang harus memerlukan dukungan dari masyarakat, para pakar ahli, hingga tokoh politik yang ternyata turut menggaungkan rasa keberatan dan kritik pedas maupun sarkas yang menyinggung di media sosial ini bisa terbaca secara luas.

Secara tak langsung penggunaan media sosial di Indonesia ini tidak hanya untuk mengakses hiburan dan informasi semata, tetapi juga sudah mulai digunakan untuk membangun gerakan – gerakan sosial, membuat gerakan ajakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, keberatan dengan sikap dan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, serta turut mengajak untuk menghujat dan menghina figur yang dinilai kontroversi.

Secara mendasar internet memfasilitasi terbentuknya jejaring sosial. Ada ikatan-ikatan sosial dan klaster-klaster yang saling terhubung di dalam ruang *virtual*. Dikatakan oleh Dahlgreen yang menggarisbawahi bahwa partisipasi politik pada dasarnya merupakan tindakan sosial yang hanya bisa terjadi atas dasar sosialitas dan komunikasi. Sosialitas di ruang *virtual* memungkinkan upaya untuk saling mendukung antar pihak yang berinteraksi di dalamnya, mempermudah pengorganisasian dan mobilisasi gagasan (Gunawan, Budi; Ratmono, 2018)

Perkembangan teknologi internet, diyakini banyak pihak memberikan alternatif saluran komunikasi yang selama ini dikuasai oleh *mainstream media*. Terciptanya jejaring sosial twitter dan jejaring lainnya, bagi masyarakat berfungsi sebagai alat menyuarakan pendapat, tanggapan, dan kritik atas realitas berbagai isu yang ada. Selama ini, masyarakat hanya mengenal media konvensional, berbentuk saluran terbatas pada surat kabar, radio, kotak-kotak saran yang tersedia di berbagai fasilitas umum, televisi, kemudian bertransformasi lahirnya telepon genggam yang menyediakan saluran melalui SMS (*Short Message Service*). Hingga hari ini, generasi *post millennium* telah berada pada perkembangan mediamorfosis, mereka disebut generasi milenial, yakni lahirnya media sosial twitter, facebook, blog, dan lainnya. Sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dengan siapa pun sangat mudah (Putra, 2019).

Jumlah audiens yang menyukai unggahan pengangkatan Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN mencapai 23,653 dengan jumlah komentar melalui instagram mencapai 2.534, sedangkan twitter mencapai 14 *retweet*, 27 *quotes*, 25 *likes*. BRIN sendiri memiliki pengikut (*followers*) mencapai 1,8 juta dan mengikuti (*following*) pihak luar mencapai 104. Bila melihat angka keseluruhan disini maka terlihat bahwa masyarakat masih banyak yang mengikuti perkembangan informasi ataupun berita terkait dengan permasalahan di BRIN Indonesia. Termasuk menyampaikan pendapat atau aspirasi termasuk mengutarakan pendapat negatif dalam bentuk satire atau sarkasme melalui media tentu wadah semacam ini juga menjadi problematika sosial di era *digital*. *Output* konten merupakan data atau *digital files* yang memuat tidak hanya informasi objektif, melainkan juga ungkapan-ungkapan diri manusia, seperti misalnya perasaannya, pemikirannya, harapannya, kisahnya, pengakuannya, dan lain sebagainya. Hal ini karena ruang *digital* tidak ada urutan zaman, status sosial, hierarki nilai. Dalam semburan pesan-pesan *digital* silih berganti masa silam tiba-tiba muncul seperti masa depan, atau masa kini mencoba bertahan dari serbuan masa silam dan masa depan dan segera raib dalam kelupaan (Hardiman, 2021).

Kebebasan untuk mengemukakan pendapat di dalam ruang *virtual* tidak selalu menjamin adanya kepatuhan etika dalam berkomunikasi. Anonimitas, *invisible*, dan *one sided* yang menjadi beberapa karakter ruang virtual merupakan celah bagi beberapa pihak untuk melakukan perundungan (*bullying*) dan pelecehan daring menyebarkan berita bohong atau palsu atau mengetahui identitas aslinya. Tentu saja perilaku-perilaku semacam melainkan cenderung menunggangi prinsip kebebasan berbicara dan berpendapat yang menjadi elemen penting dalam demokrasi (Gunawan, Budi; Ratmono, 2021).

Jejaring sosial yang begitu lekat dalam perbincangan dalam ruang publik yang bebas dan luwes meski kerap kali tidak memperhatikan etika berbicara, namun tanpa sadar atau tidak disengaja antar individu yang mayoritas tidak saling mengenal satu sama lain bisa berdiskusi membentuk komunitas virtual hingga jaringan komunikasi yang terbentuk satu sama lain maupun jaringan komunikasi yang memiliki satu visi dan sentiment yang sama sehingga jaringan komunikasi inipun berkembang menjadi budaya komunikasi tersendiri antar pengguna.

Pada komentar pedas dari konten-konten negatif yang termuat di media sosial twitter hingga youtube pun akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang merasa bahwa keberadaan Megawati tidak dikehendaki oleh masyarakat terutama menjadi Pengarah Dewan lembaga riset yang sebenarnya, dinilai oleh para elit politik, tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini yang dinilai memunculkan intrik kontroversi publik dan pemerintah yang kemudian mendorong gerakan massa secara digital dengan komunikasi-komunikasi negatif di media sosial.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka disini ada ketertarikan dari peneliti untuk meneliti budaya komunikasi negatif para netizen atau masyarakat pengguna di media sosial twitter dan youtube melalui akun resmi BRIN Indonesia dan mengidentifikasi distribusi jaringan komunikasi dalam membangun sentimen negatif terkait pengangkatan Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN Indonesia. Melalui teori *Computer Mediated Communication* (CMC) peneliti menganalisis budaya komunikasi yang dibangun oleh para netizen pada konten pengangkatan dan ucapan selamat BRIN Indonesia kepada Megawati yang telah diangkat sebagai Pengarah Dewan BRIN Indonesia. Dalam teori CMC dua mesin atau lebih dapat saling berinteraksi, namun bagaimana dua orang atau lebih dapat berkomunikasi satu dengan lainnya dengan menggunakan alat bantu komputer melalui program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. Dengan ini dapat diketahui, bahwa yang diperlukan partisipan CMC dalam menjalankan komunikasi dengan komunikannya harus melibatkan dua komponen, yaitu komputer dan jaringan internet (Crispin Thurlow, 2004)

METODE PENELITIAN

Mendalami dan menganalisis budaya komunikasi melalui media siber terutama pada komentar para netizen di media sosial twitter dan youtube terkait dengan konten ucapan selamat atas pengangkatan Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN Indonesia, maka peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan netnografi. Upaya melihat konstruksi budaya

komunikasi negatif yang dilakukan oleh pengguna media sosial atau netizen ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis untuk melihat dasar pengalaman dan budaya individu dalam membangun komunikasi di ruang media siber sehingga pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan etnografi virtual dengan metode netnografi. Pada netnografi dimulai dari mendefinisikan permasalahan, identifikasi komunikasi, membangun komunitas partisipan melalui observasi, analisis data dan menemukan pandangan terhadap implikasi interaksi yang terjadi di ruang siber (Kozinets, 2002).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara *snowball sampling* pada kolom komentar di media sosial twitter dan youtube pada akun @brin_indonesia. *Snowball sampling* digunakan karena jumlah komentar netizen yang fluktuatif di setiap hari dengan perhitungan periode waktu penelitian dimulai Oktober hingga November 2021. Pemilihan durasi waktu ini ditentukan berdasarkan pada tren informasi dan pemberitaan di media massa serta perbincangan *netizen* di media sosial sejak diangkatnya Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN Indonesia.

Lokus penelitian dilakukan dengan menggunakan perangkat internet beserta melalui media sosial dengan observasi mendalam partisipan, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada *netizen* yang terlibat dalam perbincangan di media sosial dengan mengkategorikan audiens yaitu “*newbie*”, “*minglers*”, “*devotees*”, or “*insiders*”, pelacak atau “*tourists*” yang disosialisasi dan “*upgraded*” ke tingkat yang lebih tinggi (Nasrullah, 2018).

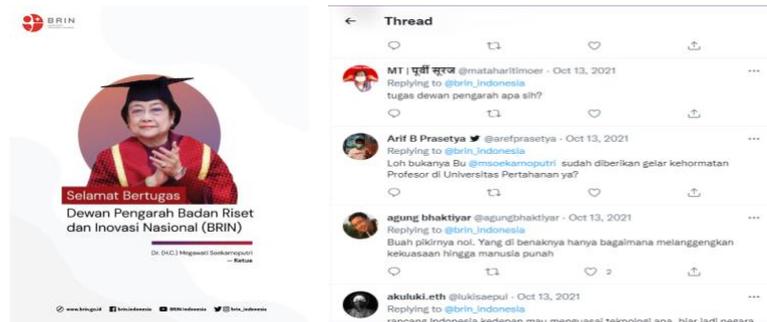
Teknik pengumpulan data primer lainnya adalah dengan wawancara mendalam dengan kreator yang membuat sekaligus merencanakan dan mengunggah konten di instagram. Teknik analisis data yang dilakukan dengan model interpretasi mikro dan makro melalui telaah penafsiran timbal balik. Proses yang dilakukan melalui koding atau pemilihan kategori data, kemudian pencatatan pada tema-tema yang membuat abstrak dan gambaran data yang dianalisis, melakukan pengecekan, selain itu melakukan teorisasi berdasarkan hasil data dengan pendalaman teori dan data.

Prosedur pertama adalah membuat hidangan budaya dengan pertanyaan spesifik, mengidentifikasi forum *online* tertentu, belajar sebanyak mungkin tentang forum, kelompok, dan peserta individu. Komunitas daring harus lebih disukai yang memiliki: (1) lebih fokus dan meneliti pertanyaan segmen, topik, atau grup yang relevan, (2) “lalu lintas” *postingan* yang lebih tinggi, (3) jumlah poster pesan yang lebih besar, lebih detail atau kaya secara deskriptif data, (5) lebih banyak interaksi antar anggota (Kurniasari, 2018).

Prosedur kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Peneliti dapat (1) menyalin dari forum anggota komunitas online secara langsung, (2) menuliskan pengamatan komunitas, termasuk anggotanya, interaksi, dan maknanya, (3) mengklasifikasikan pesan sebagai terutama pada topik atau terutama di luar topik, (4) mengkategorikan pengguna sebagai “turis”, “pencampur”, “pemuja”, atau “orang dalam”, (5) melacak bagaimana “turis” atau “pencampur” disosialisasikan dan “ditingkatkan” ke tingkat yang lebih tinggi, (6) merekam pengamatan mengenai subteks, dalih, kontinjensi, kondisi dan emosi pribadi, (7) mengkontekstualisasikan data *online* (Kurniasari, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data ini kontroversi terhadap penunjukan Megawati selaku pimpinan Dewan Pengarah BRIN sebab letaknya selaku pimpinan Dewan Pengarah BPIP merangsang polemik di tengah publik yang dinilai tidak pas serta tidak mempunyai basis hukum kemudian mayoritas publik yang menjadi netizen menilai bahwa pada pengangkatan Pengarah Dewan BRIN ini memang didasarkan pada kepentingan politis dan juga adanya ambisi kekuasaan yang dimiliki oleh Megawati untuk menjabat sebagai Pengarah Dewan BRIN setelah sebelumnya menjadi sebagai Pengarah BPIP.



Gambar 1.

Unggahan Ucapan Selamat kepada Megawati di Instagram
https://www.instagram.com/p/CU-TueeJnL_/

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti disini, komentar-komentar negatif tidak didasarkan pada kepentingan organisasi oposisi. Pada komentar terlihat bahwa subjek teks dibuat oleh masing-masing individu yang mayoritas terklasifikasi pada *devotee*, *tourists*, dan *newbie*. Temuan data yang diperoleh peneliti dari media sosial instagram ditemukan secara mayoritas bahwa *opositionate* atau pihak – pihak yang tidak sependapat dan turut menegasikan Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN. Posisi audiens mayoritas sebagai pihak *tourists* atau pendatang yang memberikan komentar-komentar negatif namun tidak berelevansi sebelumnya dalam menanggapi pengangkatan dan ucapan selamat kepada Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN. Bila diakumulasikan secara angka pada twitter, total 17 komentar semua memberikan sentimen negatif, termasuk 27 *quote tweets* hanya 2 yang berada pada posisi *insider* atau yang memberikan pandangan positif atau argumen yang *negotiate*. Pada jumlah penyuka mencapai 25 *like* namun sisanya tidak menanggapi. Tanggapan pada twitter ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Taksonomi dan Klasifikasi Komentar Sarkasme pada konten ucapan selamat kepada Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN di Twitter

Kategori Tanggapan	Deskripsi	Klasifikasi	Jumlah Temuan
Politik	Sentimen dugaan motif politik dan kepentingan politik	<i>Devotee</i>	3
Kekuasaan	Motif ambisi kekuasaan untuk menduduki Pengarah dewan Brin	<i>Tourists</i>	1
Pessimism	Tidak mampu menjadi pimpinan karena tidak berpengalaman di bidang akademik	<i>Devotee</i>	3
Meragukan	Mempertanyakan kemampuan dalam memimpin dan membina	<i>Newbie</i>	3
Kredibilitas	Citra yang kurang baik dalam track record kinerja dan potensi kemajuan	<i>Tourists</i>	1
Satire	Sindiran dalam bentuk kata-kata dengan bentuk leluconan atau bergaya komedi.	<i>Newbie</i>	5

Sumber: Hasil olahan peneliti

Berdasarkan taksonomi dari data yang ditemukan dalam dijelaskan bahwa mayoritas para pengguna yang memberikan komentar di konten ucapan selamat kepada Megawati tersebut adalah *devotee* yang merupakan komentar untuk menyudutkan pihak tertentu dan terlihat seolah membela kepentingan yang lebih luas di konten *tweet* tersebut kemudian memberikan pendapat dan komentar-komentar negatif.

Kategori ini ada pada kategori yang memberikan spekulasi dugaan ada motif politik, pesimistis, keragu-raguan, serta memberikan satire. Komunikasi yang dibangun beragam mulai dari pernyataan tegas, tersamar, memberikan pertanyaan tidak jelas tanpa jawaban, hingga memberikan analogi yang bersifat lelucon melalui kolom komentar tersebut.

Beberapa komentar tersebut dapat dilihat pada salah satu kutipan yang memberikan dugaan adanya motif kepentingan politik dan kekuasaan, serta adanya rasa keragu-raguan dari para komentar yang

ada di twitter BRIN ketika mengunggah ucapan selamat bertugas untuk Megawati sebagai Dewan Pengawas BRIN seperti berikut:

“Buah pikirnya nol. Yang di benaknya hanya bagaimana melanggengkan kekuasaan hingga manusia punah”

“Mau dibawa kemana risetnya kalau ada dewan pengawas segala? Isinya pun bukan ilmuwan atau akademisi malah politisi dan pebisnis ckck”

“Inovasi apa yang ingin diminta dari buk mega?”

Bentuk tidak sedikit pula yang memberikan sarkasme yang menertawakan sebagai cara meremehkan atau terkesan menganggapnya sebagai lelucon. Seperti beberapa komentar dengan menuliskan “*wkwkwkwk.....*” bila dilihat dari aspek Netspeak dengan menggunakan akronim dua kata. Seperti pada kalimat berikut:

“Badan Riset, semuanya Prof, eh Pengarahnya itu wkwkwkwkwkwkwkwkwkwk maaf2x, reflek ktawa...sekali maaf...”

Dua kata “w” dan “k” adalah kata-kata tertawa terbahak-bahak yang biasa digunakan pada anak-anak muda saat ini ketika berkomunikasi melalui media sosial atau melalui media chatting. Kata ini berada pada tingkatan tertawa dengan level tertinggi atau terbahak-bahak yang bila tidak diucapkan. Ada pula yang tidak menggunakan ungkapan kata tertawa, cukup mengutarakan secara lugas “*Aku tertawa :)*” Ungkapan sarkasme semacam ini ditempatkan pada klasifikasi pengguna komen yang bersifat *tourists*.

Selain bisa digunakan sebagai lelucon, namun juga biasa digunakan untuk menganggap rendah orang lain dalam bentuk lelucon. Sehingga disini para pengguna yang berkomentar menertawakan sosok Megawati yang menjadi Pengarah Dewan BRIN. Namun pada kata terbahak-bahak ini tidak dijelaskan berupa keterangan alasan menertawakan, sehingga hanya terkesan melihat suatu dagelan dalam konten di media sosial. Tertawaan ini tidak hanya diunggah melalui komen, namun juga melalui *quotes* di twitter.

Komunikasi *digital* yang semula adalah bagian kecil komunikasi sosial dewasa ini sedang berada dalam perjalanan untuk menggantikan bentuk-bentuk komunikasi *corporeal*. Aktivitas *digital* kita, seperti mengecek dan menjawab pesan, mengunduh video atau foto, bermain, membayar, dan seterusnya, sudah mendominasi aktivitas harian kita. Ruang bertindak kita sebagai *homo digitalis* sudah tersedia di sana. Keterlibatan dalam media sosial, misalnya instagram, mulai dituntut oleh berbagai perusahaan sebagai bagian identitas seseorang saat rekrutmen (Hardiman, 2021).

Media-media sosial, seperti *Twitter, Facebook, Whatsapp, Tik Tok, Instagram*, telah banyak mempermudah penyebaran dan pertukaran informasi, dan hal itu merupakan realisasi baru kodrat sosial manusia. Namun proses penyebaran dan pertukaran pesan yang dimungkinkan oleh teknologi *digital* itu sering bergerak jauh lebih cepat daripada kesadaran moral kita (Hardiman, 2021). Minimnya moral yang dilakukan oleh para pengguna akun ini seperti menertawakan sosok orang secara terbuka dengan mudah melalui komen di media sosial tersebut dan menganggapnya sebagai lelucon secara transparan. Anggapan lelucon bukan hanya diutarakan dengan tertawaan, namun juga menggunakan satire atau sindiran dalam bentuk humor dan menampilkannya bentuk analogi yang lucu. Satire semacam ini dituliskan sebagai ungkapan kekecewaan dari pengguna yang tidak sepakat atau tidak suka dengan terpilihnya Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN dengan berbagai alasan seperti menganggapnya sebagai kepentingan politik, ambisi kekuasaan, atau ketidakmampuan mengelola Badan Riset karena dinilai tidak kredibel tanpa memberikan alasan yang jelas.

Hal yang hampir serupa juga ada pada instagram. Jumlah komentar negatif di instagram lebih besar dibanding twitter yang mampu mencapai 23.534 komentar. Adanya instagram sangat memungkinkan untuk mendapat tanggapan lebih besar dari para milenial terutama untuk pengguna di Indonesia yang sudah berada di urutan ketiga dengan mencapai 79% pengguna setelah Facebook (<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>).

Selain itu pada pemilihan objek sampel yang diteliti ini, peneliti menemukan bahwa dalam satu unggahan terdiri dari tiga *slide posting* konten. Berdasarkan ketiga unggahan tersebut, justru unggahan ucapan selamat kepada Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN yang paling banyak dikomentari hampir keseluruhan dengan nuansa pesimistis dari para netizen. Selain itu, unggahan ucapan selamat Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN ini ditempatkan pada *slide* pertama hingga paling mudah tersorot publik. Kemudian sosok Megawati di antara jajaran BRIN lainnya yang paling dikenal karena kiprahnya di dunia politik sudah lama.



https://www.instagram.com/p/CU-TueeJnL_/

BRIN memiliki akun resmi (*official*) di *twitter* maupun *instagram* sebagai media informasi kepada publik. Hal ini juga menjalankan kewajiban yang diatur dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengharuskan lembaga pemerintah untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat. Media sosial sangat memungkinkan untuk memberikan informasi secara mudah sehingga potensi terhadap resiko keluar masuknya komentar negatif dari publik yang bisa melewati penyaringan informasi itu sendiri.

Di *instagram* juga hampir mirip dengan *twitter* yang mayoritas komentar-komentar para netizen didominasi oleh komentar negatif dan sarkasme. Hal ini dikarenakan sentimen negatif juga mendominasi pada komentar-komentar mengenai Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN di *Instagram*.

Tabel 2. Hasil Taksonomi dan Klasifikasi Komentar Sarkasme pada konten ucapan selamat kepada Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN di Instagram

Kategori Tanggapan	Deskripsi	Klasifikasi	Jumlah Temuan
Politik	Sentimen dugaan motif politik dan kepentingan politik	<i>Tourists</i>	10
Program Kerja	Membahas program kerja institusi	<i>Mingler</i>	20
Kekuasaan	Motif ambisi kekuasaan untuk menduduki Pengarah dewan Brin	<i>Devotee</i>	20
Pesimis	Tidak mampu menjadi pimpinan karena tidak berpengalaman di bidang akademik	<i>Tourists</i>	800
Minim prestasi	Dianggap tidak memiliki prestasi di bidang akademik termasuk dinilai tidak memiliki prestasi kerja.	<i>Insider</i>	500
Kredibilitas	Citra yang kurang baik dalam <i>track recor</i> kinerja dan potensi kemajuan	<i>Mingler</i>	1000
Satire	Sindiran dalam bentuk kata-kata dengan bentuk leluconan atau bergaya komedi.	<i>Tourists</i>	100

Sumber: Hasil olahan peneliti

Bila dilihat dari klasifikasi *mingler* lebih banyak membahas tentang persoalan program kerja dari BRIN. Hal ini komentar dari pengguna akun yang menjabarkan komentarnya secara data terkait dengan skema kerja dari BRIN tersebut dapat dilihat dari komentar berikut:

“Keluh kesah mengenai skema sertifikasi indonesia seperti bidang welding & NDT saat ini masih kurang jelas arahnya dan sedikit ada pengakuan di kancah internasional project, saya harap seperti sertifikasi welding inspector; NDT Teknisi yg mana sertifikasi punya kita bisa setara dgn CSWIP ataupun PCN. Untuk bidang kelistrikan kalo bisa sertifikasi elektrikal inspector bisa setara dgn Compex/ATEX certificate perputaran uang cepat dari bisnis sertifikat, harga sertifikasi ini sangat mahal, ketat ujiannya dan banyak jg minta khususnya project yg dari luar negeri”

Pada komentar dari klasifikasi *mingler* ini menggunakan data atau fakta yang ditemukan oleh subjek tersebut dalam mengomentari pengangkatan Megawati sebagai Dewan BRIN dengan fakta data mengenai program riset dan sertifikasi bagi akademisi maupun bagi peneliti. Posisi *mingler* merupakan keterlibatan subjek/individu yang memahami program riset atau akademik.

Selebihnya adalah posisi *tourists* dengan menyampaikan komentar berupa sarkasme seperti tertawa atau membuat sindiran lunak dengan penyampaian yang lugas namun terkesan menceramahi seperti halnya dalam kegiatan religi yang menyampaikan ancaman hukum karma, seperti pada komentar berikut:

“Mudah2an amanah, sebab kalau tidak amanah bisa menjadi bencana buat dia sendiri dan keluarganya, serta yang mengangkat dia sebagai di posisi ini.”

Sindiran keras pun juga tidak luput dari kolom komentar dengan menyindir hal pribadi seperti latar belakang pendidikan yang dinilai tidak kompeten dengan jabatan yang dipegangnya saat ini selain itu menyindir bahwa Megawati lebih mengedepankan ambisi kekuasaan.

“Nenek sapa sih ni -_- ingat umur dong. Kalau masih rakus mau perluas kerajaan bonekanya tolong di luar Indonesia aja dong Nek kami lelah nek.”

Bila dikaji dari *netspeak* disini menggabungkan antara *icon* dan kata. Pada *icon* seperti “-_-” merupakan bentuk perwajahan orang sedih dengan tujuan meng *underestimate* sebuah pernyataan atau tuturan dari objek maupun subjek lain. Begitu pula pada salah satu komentar hanya menuliskan “*Sad ☹*” yang dapat diartikan sebagai rasa sedih. Jika ungkapan dalam arti sebenarnya adalah rasa sedih, namun fungsi *icon* pada wajah sedih tersebut difungsikan sebagai rasa pesimis untuk tujuan sarkas atau sindiran secara lunak dan tidak terlihat lugas atau jelas dengan tujuan memberikan penekanan satu kata. Biasanya makna kata seperti sedih karena terpilihnya seorang Megawati yang tidak diharapkan atau bukan sosok figur ideal seperti tokoh peneliti yang diharapkan.

Keterhubungan antar-entitas secara global menyebabkan ada pertukaran kultur yang terjadi. Pertukaran kultur ini menurut berbeda dengan pertukaran di dunia nyata di mana struktur kelas sosial atau kekuasaan masih mendominasi produksi kultur itu sendiri. Internet memberikan kebebasan terhadap produksi makna (kultur) dan menjadikan entitas sebagai diri yang bebas untuk memproduksi kultur sekaligus mengonsumsi kultur itu sendiri (Castells, 2011).

Kemudian pada kata penggunaan ungkapan berupa perumpamaan atau metafora “kerajaan boneka” yang dapat diartikan sebagai sebuah wadah permainan yang penuh dengan kuasa dan kekuasaan. Disini dapat diartikan bahwa membangun sebuah “kerajaan” yaitu membangun struktur kekuasaan. Sedangkan boneka adalah orang-orang yang di bawah pengaruhnya yang bisa dikendalikan seperti objek boneka fisik pada makna sebenarnya dan terus berada dibawah pemantauannya. Stigma ini cukup melekat pada Megawati sejak dirinya mengusung Jokowi maju dalam Pemilihan Presiden RI periode 1 dan 2 karena Jokowi distigmakan sebagai figur politik dibawah pengaruh kekuasaan dan selalu dikendalikan oleh Megawati. Sehingga, stigma politis semacam itu terus melekat pada Megawati.

Komentar-komentar yang menilai dan menganggap bahwa terpilihnya Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN juga meragukan kompetensi Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN. Para pengguna akun yang berkomentar menilai bahwa Megawati hanya figur politisi bukan akademisi mengingat tidak pernah berkarir atau menjabat sebagai dosen, serta tidak memiliki ijazah perguruan

tinggi dengan minimal kriteria pendidikan S2. Sedangkan para pejabat-pejabat BRIN yang diangkat mayoritas berpendidikan S3 dan ada pula yang bergelar profesor.

Selain sindiran, ungkapan yang meragukan atau rasa pesimistis juga diutarakan oleh para *netizen* secara bebas karena menurunnya rasa kepercayaan lantaran dinilai tidak memiliki kompetensi atau sejenisnya. Ungkapan ini bersifat subjektif dari masing-masing individu yang berkomentar serta mengeluarkan pendapatnya. Terkadang sindiran yang diberikan oleh para *netizen* tidak selalu berbentuk pernyataan keras atau halus, namun juga bisa berupa pertanyaan yang memojokkan posisi objek. Komentar tersebut dapat dibaca sebagai berikut.

“Apakah sudah hal yg tepat secara kredibilitas dan kemampuan untuk lembaga seperti ini.”

Ada beberapa tema yang menjadi anggapan bagi kebanyakan netizen yang berkomentar melalui kolom komentar akun BRIN tersebut bahwa terpilihnya Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN dikarenakan faktor politik yang kuat sehingga tidak obyektif. Seperti pada komentar berikut:

“Orang politik jadi pengarah perkembangan iptek...? Paling penelitian diarahkan ke survey survey ajah. Betapa hebat banteng merah itu. Itu nenek DO dari UNPAD lah mending saya sempat lulus”.

Pada komentar ini tidak hanya berupa sindiran biasa, namun berupa sindiran keras dan memberikan info terkait dengan keburukan Megawati yang memanfaatkan kekuatan politik dengan latar belakang partai PDI Perjuangan. Seperti pada komentar di atas ini tercantum “banteng merah” yang merupakan ikon dan simbol logo utama dari partai PDI Perjuangan dan juga Megawati sendiri lah Pengarah Umum Partai PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu pada pengguna yang berkomentar ini juga mengungkapkan bahwa Megawati tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang tuntas. Terlihat dari kata “nenek DO” penggunaan akronim DO berarti (*Drop Out*) yang artinya bahwa Megawati sempat dikeluarkan dari UNPAD dengan status melewati masa studi atau tidak sampai selesai. Sehingga klasifikasi disini bukan hanya sebatas *insider* namun juga menjadi *mingler* yang mengungkapkan sebuah fakta latar belakang.

Dalam muatan pernyataan komentar dari konten unggahan di instagram juga memiliki keterhubungan antara komentar satu dengan yang lain. Misalkan penggunaan *satire*, kemudian juga anggapan yang menghina secara halus. Seperti beberapa pengguna yang berkomentar pada akun instagram hanya menggunakan satu kata “LAWAK” atau “DAGELAN”. Makna dari kata ini bisa dikatakan sebagai lelucon atau perihal yang lucu. Kata lelucon atau lucu disini bukan lucu dalam makna sebenarnya tapi menertawakan Megawati yang diangkat sebagai Pengarah dewan BRIN. Sehingga bentuk *satire* semacam ini dilakukan dengan ungkapan yang beragam melalui kata-kata singkat atau kalimat yang menunjukkan poin lelucon di dalamnya.

Persinggungan yang bersifat lelucon ini, para pengguna akun instagram yang berkomentar di unggahan ucapan selamat untuk Megawati ini juga menertawakan jabatan profesor *honoris causa* yang gelar kehormatan tersebut tidak layak diberikan kepada Megawati karena bukan seorang akademisi, peneliti, maupun pendidik. Sehingga pemberian gelar ini kemudian dianggap sebagai lelucon oleh khalayak yang berkomentar di unggahan instagram tersebut. Sehingga berbagai macam asumsi dan anggapan bisa saling terhubung satu sama lain.

Jika ditelusuri data lebih mendalam, tidak sampai 100% bahwa seluruh teks pada komentar bersifat sarkasme. Namun ada pula yang masih berpikir *negotiate* terhadap seperti mengucapkan selamat seperti pada teks berikut”

“Selamat bertugas bu Megawati dengan jabatan barunya..”

Bila dilihat dari hasil temuan penelitian, maka dapat dikaji bahwa interaksi yang terjadi tidak mensyaratkan adanya kesamaan seperti status atau tingkat pengetahuan (*astigmatic*). Komunikasi teks di dunia siber tidak juga melibatkan visualisasi para pengguna sebagaimana di dunia nyata yang terkadang dalam komunikasi tatap muka seseorang akan mengambil sikap tertentu ketika berhadapan dengan seseorang karena stigma yang muncul pertama kali di benaknya (Nasrullah, 2016).

Beberapa aspek komunikasi dalam dunia siber diuraikan sebagai berikut, *pertama*, bahwa komunikasi atau interaksi di dunia daring tidak memerlukan adanya dan kesamaan antar pengguna media daring, selama fungsi interaktif media daring masih ada. *Kedua*, interpretasi interaksi dalam media jaringan dapat disesuaikan dengan, misalnya, jadwal yang diinginkan pengguna saat terhubung ke jaringan. Komunikasi dapat (bisa) berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama (sinkron), atau

bisa berbeda (asinkron). *Ketiga*, interaksi yang berlangsung di dunia online sebenarnya berlangsung melalui media teks. Berbagai bentuk teks dan teks yang mengandung simbol (ikon) menjadi media bagi pengguna untuk berkomunikasi. *Keempat*, tidak perlu adanya kesamaan, seperti status atau tingkat pengetahuan, agar interaksi dapat terjadi (Marc Smith, 2006 dalam Nasrullah, 2016).

Jika dilihat dari bentuk interaksi di media sosial Instagram, unggahan ucapan selamat kepada Megawati yang diangkat sebagai Pengarah Dewan Penasihat BRIN pada akun resmi Instagram BRIN_Indonesia tergolong dalam bentuk interaksi *asynchronous* media berupa teks yang bentuk interaksinya seperti dalam forum komentar pada kolom yang tersedia. Sedangkan konten yang diunggah berupa visual foto yang berisi ucapan selamat kepada Megawati hanya satu unggahan visual foto saja.

Berdasarkan wawancara dengan kreator desain, Anastasia Lintang Proborini yang membuat *flyer* ucapan selamat kepada Megawati tersebut dan mengunggah ke media instagram tersebut mengaku bahwa dirinya membuat desain atas dasar penugasan dari divisi Humas BRIN yang pada saat itu masih di bawah Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik (KSKP) Ristek BRIN (sekarang menjadi Biro Komunikasi Publik dan Kesekretariatan BRIN). Berada di bawah unit Pengolah data, publikasi dan dokumentasi terutama desain untuk sosial media.

Merebaknya rumor tentang Megawati menjadi Pengarah Dewan pengawas BRIN juga menjadi perhatian para pekerja di unit KSKP lantaran sosok Megawati tidak pernah ada sebelumnya. Rumor itu pun menjadi nyata ketika Lintang ditugaskan untuk membuat desain unggahan media sosial untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN. Menurut Lintang, tidak hanya ucapan selamat kepada Megawati saja, namun juga kepada seluruh peneliti atau jajarannya yang terpilih menjabat di BRIN selalu dibuatkan ucapan selamat serta diunggah ke media sosial.

Diakui oleh Lintang bahwa pada saat itu tim KSKP memang tidak setuju dengan pengangkatan Megawati tersebut karena latar belakang yang tidak sesuai.

“Dinilai oleh tim KSKP karena tidak punya kapabilitas menjadi Pengarah Dewan Pengawas dan ada kecurigaan politisasi. Selain itu tidak ada peneliti-peneliti muda yang diangkat jadi struktural BRIN semuanya tua-tua nggak cuma Megawati aja. Sehingga ada rasa tidak percaya dari tim KSKP juga.”

Ketika banyak sarkasme di komentar media sosial ini rupanya juga menjadi masalah di divisi KSKP yang sempat membuat bingung KSKP untuk mengambil langkah pencitraan BRIN kembali. Tidak disangka oleh para tim KSKP bahwa pernyataan-pernyataan negatif atau sarkasme terhadap Megawati begitu memenuhi komentar unggahan Megawati di BRIN tersebut secara negatif. Menurut Lintang, orang-orang KSKP tidak bisa berkutik dan hanya diam serta tidak menanggapi pernyataan para *netizen*.

“Ada langkah yang suda coba untuk dilakukan seperti ditutup dengan berita-berita BRIN di sosmed tapi tetap saja yang menjadi masalah terkait pengangkatan Megawati mengundang komentar-komentar negatif. Komentar-komentar tetap dibiarkan terbuka meskipun mengkhawatirkan. Bagi para pegawai justru tidak setuju dan tidak sepakat dengan pengangkatan Megawati sebagai Pengarah Dewan BRIN.”

Pemahaman seseorang terhadap realitas yang dilihatnya juga diinterpretasikan sesuai dengan pengalaman indrawinya termasuk pemahaman seorang warga net atau *netizen* ini terhadap Megawati karena sudah mengetahui dan memahami sosok figur Megawati jauh sebelumnya sehingga hal ini diungkapkan dan diemosionalkan ketika figur yang diketahui atau bahkan dikenalnya tersebut dianggap tidak *capable*, *incredible*, dan *incompetence* maka kemudian diutarakan melalui postingan komentar di media sosial twitter maupun instagram sebagai media sosial tempat dimana unggahan Megawati itu berada.

Bila di bidang politik pandangan masyarakat yang kolektivistis, holistis, dan organistis sering menghasilkan konservatisme dan totalitarianisme. Peranan bebas individu, golongan atau partai, yang bermaksud memperjuangkan perubahan sosial, ditentang atau dicurigai. Masyarakat tidak dikuasai oleh prinsip kemauan bebas manusia, melainkan oleh dinamika hukumnya sendiri (Veeger, 1990).

Terkadang pandangan politisi kerap dianggap irasionalitas oleh masyarakat karena atas dasar kepentingan-kepentingan dalam lingkup minor, terkhususkan pada kelompok eksklusif dan elit yang

tidak diketahui oleh publik dan tidak transparan sehingga meluaskan interpretasi publik untuk berspekulasi menanggapi pengangkatan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN sebagai kepentingan politik, modus kekuasaan, dan juga melakukan pekerjaan yang bukan berada di bidang kompetensinya.

Salah satu efek atau konsekuensi dari interaksi di media siber itu adalah teks termasuk imej yang secara visual menjadi satu-satunya sarana komunikasi. Termasuk, perundungan siber (*cyber bullying*) ini lebih banyak terjadi dengan menggunakan teks dikarenakan komunikasi maupun interaksi di media siber diwakili oleh teks (Bell, 2001; Hine, 2000; Shariff, 2011 dalam Nasrullah, 2017). Jika mengupas perundungan siber, teks menjadi sarana untuk melakukan tindakan negatif, seperti pelecehan atau ejekan.

Perundungan ini pun bermacam-macam model teksnya dengan menggunakan bahasa internet yang mencakup bahasa (*writing*), bahasa bicara (*speaking*), dan bahasa tanda (*signing*). Atau bagaimana pengaruh teknologi pada akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan ikon emosi (*emoticon*). Ikon-ikon muncul sebagai simbol dari emosi pengguna dengan modifikasi dari simbol-simbol keseharian menjadi bahasa komputer mulai dari ikon yang sederhana, seperti yang kerap digunakan pada teks posting Megawati di media sosial resmi BRIN, terdapat ☹ untuk menandakan sedih, (-_-) murung kemudian :D menertawakan.

Konstruksi sosial amat terkait dengan kesadaran manusia terhadap realitas sosial itu, karena itu kesadaran adalah bagian yang paling penting (Bungin, 2008). Pengalaman pada individu sebagai pembentuk kesadaran manusia itu sendiri, membentuk realitas dari terminologi *netspeak* dan *netlingo* ini memberikan ungkapan emosional pada keluh kesah, rasa tidak percaya, emosi kemarahan, termasuk meremehkan yang ada di bagian-bagian klasifikasi audiens dalam menanggapi terpilihnya Megawati sebagai Dewan Pengawas BRIN.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk sarkasme yang diutarakan oleh para pengguna media sosial yang mengomentari konten ucapan selamat kepada Megawati sebagai Dewan Pengawas BRIN lebih banyak memberikan spekulasi atau anggapan, maupun justifikasi bahwa pemilihan Dewan Pengawas BRIN sarat dengan kepentingan politik dan juga upaya mempertahankan kekuasaan di Pemerintahan.

Para *netizen* yang berkomentar menganggap bahwa keberadaan Megawati sebagai Dewan Pengawas BRIN tidak kompeten dan hanya memanfaatkan kekuatan dirinya sebagai figur politik yang memiliki peranan untuk bisa menduduki Dewan Pengawas BRIN. Berbagai macam spekulasi, sarkasme tersebut diutarakan dengan bahasa dan kalimat yang non lugas atau kerap tersamar dengan gaya sindiran, gaya satire hingga penggunaan bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam ritme bahasa komputer. Hal ini terlihat pada penggunaan *Netspeak* dan *Netlingo* seperti penggunaan bahasa 'kekinian' hingga penggunaan bahasa lelucon satire yang biasa diutarakan dengan teks virtual di media sosial, kemudian menggunakan kata-kata akronim dalam mengutarakan pesan.

Klasifikasi audiens yang paling banyak berkomentar adalah klasifikasi *tourists* dan juga *devotee*, namun lebih banyak untuk memberikan kritik bersifat oposisional dan seperti berpihak memperjuangkan kepentingan riset maupun lembaga riset sehingga audiens terlihat tidak banyak memiliki pengetahuan tentang lembaga riset dan hanya memperhatikan sosok Megawati yang kontroversial.

DAFTAR PUSTAKA

- Beran, T., & Qing, L. I. (2005). Cyber-harassment: A study of a new method for an old behavior. *Journal of Educational Computing Research*, 32(3), 265–277. <https://doi.org/10.2190/8YQM-B04H-PG4D-BLLH>
- Castells, M. C. (2011). The Rise of The Network Society. With a New Preface. In M. Castells (Ed.), 274

- Anaphylaxis and Hypersensitivity Reactions: Vol. I* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
<https://doi.org/10.1007/978-1-60327-951-2>
- Coole, D. (2007). Experiencing discourse: Corporeal communicators and the embodiment of power. *British Journal of Politics and International Relations*, 9(3), 413–433.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2006.00258.x>
- Crispin Thurlow, L. L. and A. T. (2004). *Computer Mediated Communications* (1st ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, Budi; Ratmono, B. M. (2018). *Kebohongan di Dunia Maya. Memahami Teori dan Praktik-praktiknya di Indonesia* (C. Gautama (ed.); 1st ed.). Kompas Gramedia.
- Gunawan, Budi; Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth* (Y. Gautama, Chandra; Wihartono (ed.); 1st ed.). Penerbit KPG.
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada* (1st ed.). Kanisius.
- Ijsselsteijn, W., Baren, J. van, & Lanen, F. van. (2003). Staying in Touch Social Presence and Connectedness through Synchronous and Asynchronous Communication Media. *Human-Computer Interaction: Theory and Practice (Part II)*, 2(924–928).
- Irwansyah. (2015). Kepemimpinan Ideal Versi Komunitas Forum Online. *CommLine*, VI(2), 103–114.
- Kozinets, R. V. (2002). Using Netnography For Marketing Research in Online Communities. *Journal of Marketing Research*, 39(1), 61–72.
- Kurniasari, N. (2018). *Netnography Study of Digital Democracy Forum (FDD) on Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). January 2018*. <https://doi.org/10.2991/icomacs-18.2018.43>
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (R. Nasrullah (ed.); 1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Nasrullah, R. (2018). *Etografi Virtual. Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet* (N. S. Nurbaya (ed.); 1st ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? *European Journal of Developmental Psychology*, 9(5), 520–538. <https://doi.org/10.1080/17405629.2012.682358>
- Putra, D. K. S. (2019). *Political Social Responsibility: Dinamika Komunikasi Politik Dialogis* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Veeger, K. . (1990). *Realitas Sosial: Refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi* (K. . Veeger (ed.); 3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.